

Dua Staf DPU Tersangka Korupsi

Ditetapkan Pasca Diperiksa Kejari Rembang

REMBANG - Deretan jumlah pejabat di Kabupaten Rembang yang tersandung perkara dugaan korupsi kini makin menggelembung. Perkembangan terbaru, kini dua orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang bakal diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Kedua pejabat tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sejumlah proyek bermasalah di Rembang, Senin (13/4) pekan depan.

Mereka adalah Kepala Bidang

Sumber Daya Air, Sinarman dan Kepala Bidang Cipta Karya, Choiron. Pemeriksaan mereka sebagai tersangka sesuai surat perintah penyelidikan (Sprindik) terhadap dugaan delapan proyek bermasalah di Kecamatan Kaliore. "Pemanggilan dua orang PPK pada DPU Rembang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari penanganan sejumlah kasus proyek bermasalah di Rembang yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah," kata Kasi Seksi Pidana Khusus Kejari Rembang, Eko Yuristiyanto.

Menurut Eko, pihaknya diminta untuk menangani dugaan proyek bermasalah dengan perkiraan jumlah kerugian negara di bawah Rp 60 juta. Sementara kerugian yang lebih besar langsung di

Kejati. Delapan proyek yang telah diteken tersebut rata-rata nilai sebesar Rp 100 juta-Rp 200 juta. "Semua proyek dikerjakan secara penunjukan. Pekerjaannya selain peningkatan jalan juga saluran air," bebarnya.

Saat disinggung soal besar kerugian negara secara total dari delapan proyek tersebut, Eko menyebutkan masih menunggu penghitungan secara resmi dari pihak badan pemeriksaan keuangan. "Berapa besar kerugian secara keseluruhan kita masih tunggu penghitungan resmi dari BPK. Kita tunggu saja hasilnya," untkannya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Eko mengaku pihaknya belum akan menahan kedua PPK tersebut. Selain karena harus koordinasi dengan pihak Kejati, ju-

Pemanggilan dua orang PPK pada DPU Rembang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari penanganan sejumlah kasus proyek bermasalah di Rembang."

Eko Yuristiyanto
Kasi Pidsus Kejari
Rembang

ga masih menunggu proses penghitungan kerugian negara. "Sepertinya kok belum (Ditahan). Kita proses pemberkasan dulu dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara," terangnya.

Dari delapan sprindik dan

Dugaan Korupsi Proyek DPU

1. Sinarman Kabid Sumber Daya Air (Tersangka)
2. Choiron Kabid Cipta Karya (Tersangka)
3. Nilai Kerugian Negara Rp 100 juta-200 Juta

dua tersangka tersebut, Eko, menyebutkan berpotensi besar akan menyeret nama-nama lain seperti pihak pengawas, rekanan dan orang-orang yang terkait dengan proyek tersebut. "Mungkin bisa sampai puluhan (Tersangka) dari Dua PPK ini. Kita lihat hasil penyelidikannya nanti komplet," terangnya.

Diakuinya penanganan kasus proyek bermasalah di Rembang yang ditangani Kejari setempat memang tak bisa berlangsung dalam waktu cepat, sebab selain pihaknya

juga harus fokus dengan penanganan dugaan penyalahgunaan dana hibah dari APBD tahun 2013 yakni kasus musala fiktif. "Kita mamang harus kerja ekstra, karena minimnya penyidik. Tapi, kami yakin bisa rampung dengan baik," terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengaku tidak mau gegabah untuk mengambil sikap atas banyaknya pejabat rembang yang terseret masalah hukum baik pada kasus musala atau pun kasus

di lingkungan DPU. "Kita tidak mau terburu-buru mengambil sikap. Saat ini kita hormati saja dulu proses hukum yang masih berjalan ini, Semuanya kan masih belum jelas bersalah. Jadi kita harus menghormati asas praduga tak bersalah," katanya.

Soal pendampingan terhadap sejumlah pejabat yang terseret masalah hukum, Hafidz mengaku masih terus mencari formula terbaik dari hasil diskusi bersama tim yang telah pihaknya bentuk. "Kita tunggu hasilnya diskusinya, yang pasti saat ini kita tidak mau dengan adanya masalah ini pemerintah mandek, semuanya harus tetap berjalan," tegasnya selepas menggelar syukuran pelantikannya di lantai IV Gedung Setda Rembang. (sov/rif)